



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN



RENJA TAHUN 2026

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2026 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPKAD, evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun lalu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2024-2026.

Tersusunnya Rencana Kerja BPKAD Tahun 2026 ini, disamping sebagai Dok Rencana Kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan BPKAD sebagai perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bangkalan, 14 Agustus 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**



AHMAT HAFID, SE, MM

NIP. 19690131 199003 1 003

DAFTAR ISI

	HAL
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	30
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	35
2.4 Review Terhadap RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	55
3.3 Program dan Kegiatan	58
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	61
Bab Penutup.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan Dok perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Sebagai sebuah Dok resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis antara lain :

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
4. Dan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dok Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas Dok Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan

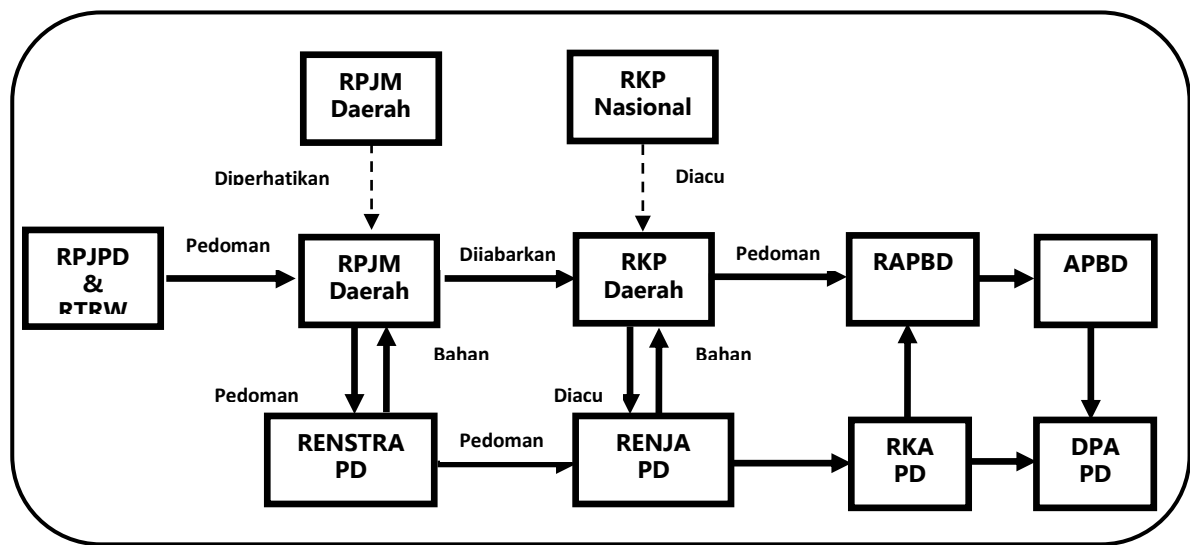
mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dok Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Keterkaitan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Dok perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1 :

Gambar 1 Keterkaitan Antara Dok Perencanaan



Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan Dok Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 merupakan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap ketiga melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani. Dok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2024 - 2026 untuk jangka waktu 3 tahun sesuai tugas dan tupoksi BPKAD dan lebih

didetailkan lagi melalui Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Selanjutnya Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Dok Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- c. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587) Perubahan terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga (renstra k/l) 2015-2019
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupate Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1/D)
- p. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- q. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
- r. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
- s. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)
- t. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 33 Seri E)
- u. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (berita daerah tahun 2025 nomor 20/E)
- v. Surat Edaran Bupati Nomor : 100.3.4.2/...../2024 tentang Pedoman penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, antara lain :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, target capaian dengan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaan anggaran;
- c. Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya;
- e. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang terukur sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan, tujuannya adalah :

- a. Sinkronisasi dan menjabarkan Rencana Strategis - Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per Bab. sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD/
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab 3 Tujuan, Sasaran Renja Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Bab 5 Penutup

BAB II

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Dari hasil evaluasi dimaksud sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Pengelolaan Aset dan Akuntansi Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi pembangunan di Bidang Pemerintahan dan otonomi daerah, pada Tahun 2024 di titik beratkan pada program utama pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi 3 (tiga) Program dan 13 (dua belas) Kegiatan dengan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dari program-program diatas, realisasi Belanja Operasi BPKAD pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 37.378.565.715,- atau 95,08%, Belanja Modal BPKAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 42.430.750,- atau 15,90%, Belanja Tidak Terduga BPKAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 688.914.659,- atau 58,51% dan Belanja Transfer BPKAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 437.753.821.544,- atau 99,99% dengan rincian program dan kegiatan antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pagu Program ini sebesar Rp. 37.377.074.491,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.070.485.014,00 atau 96,50% yang diterjemahkan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 7.056.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.136.300,- atau 89,51% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.727.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.005.500,- atau 73,52%
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.215.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.202.500,- atau 98,90%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.086.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.084.800,- atau 99,83%
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.026.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.023.500,- atau 99,86%%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 32.746.324.903,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.700.251.666,- atau 96,81% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.727.399.103,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.681.575.066,- atau 96,80%

- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.776.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.536.300,- atau 98,25%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.148.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.140.300,- atau 99,83%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 1.951.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.904.200,- atau 97,59% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.951.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.904.200,- atau 97,59%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 6.628.363,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.826.000,- atau 87,90% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.628.363,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.826.000,- atau 87,90%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 365.261.585,- dan terealisasi sebesar Rp. 355.453.084,- atau 97,31% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.614.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.737.350,- atau 84,38%
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.784.385,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.625.300,- atau 93,58%
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.170.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.486.000,- atau 93,27%

- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.821.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.350.000,- atau 96,90%
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.860.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.840.000,- atau 79,01%
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.934.100,- atau 94,61%
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 189.512.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 189.480.334,- atau 99,98%
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 3.998.607.364,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.788.965.608,- atau 94,76% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.270,- atau 46,85%
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.262.364,- dan terealisasi sebesar Rp. 249.610.360,- atau 99,74%
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.747.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.539.120.978,- atau 94,43%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 251.244.476,- dan terealisasi sebesar Rp. 211.768.156,- atau 84,29% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.434.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.739.325,- atau 85,79%
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.892.640,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.298.831,- atau 73,40%

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 67.917.536,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.730.000,- atau 90,89%

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 440.333.424.961,- dan terealisasi sebesar Rp. 439.789.461.870,- atau 99,98% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 1.285.225.990,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.234.890.000,- atau 96,08% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.965.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.496.000,- atau 97,76%

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.965.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.566.000,- atau 98,10%

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.446.000,- atau 99,76%

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.026.000,- atau 96,49%

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.950.000,- atau 99,75%

f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 443.687.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 422.990.000,- atau 95,34%

g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 420.362.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 401.333.000,- atau 95,47%

- h. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 323,246,990,- dan terealisasi sebesar Rp. 314,083,000,- atau 97,17%
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 72.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.093.000,- atau 98,74% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.850.000,- atau 100%
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.836.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.936.000,- atau 96,38%
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.763.000,- atau 99,96%
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK) , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.544.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.544.000,- atau 100%
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 43.472.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.742.667,- atau 93,72% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.022.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.672.064,- atau 88,42%

- b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.487.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.476.500,- atau 99,94%
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.962.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.594.103,- atau 88,70%
- 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 438.932.726.621,- dan terealisasi sebesar Rp. 438.442.736.203,- atau 99,89% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 428.676.248.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 428.674.752.118,- atau 99,99%
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.177.408.495,- dan terealisasi sebesar Rp. 688.914.659,- atau 58,51%
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.079.069.426,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.079.069.426,- atau 100%
- C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 803.035.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 493.776.202,- atau 61,49% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 803.035.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 493.776.202,- atau 61,49% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Standar Harga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 235.240.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 231.457.000,- atau 98,39%
 - b. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 480.240.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.284.802,- atau 37,96%

- c. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.342.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.514.000,- atau 94,68%
- d. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.554.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.034.400,- atau 91,41%

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024										
5.02	KEUANGAN									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dok perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100%
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100%

5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100%
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2 Dok	1 Dok				1 Dok	2 Dok	100%
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1 Dok				1 Dok	2 Dok	100%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	18 Laporan	100%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	8 Laporan				8 Laporan	16 Laporan	100%
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuanagn PD terlayani tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	100%	51Orang / bulan	51Orang / bulan	51Orang / bulan	100%	51Orang / bulan	100%	100%
5.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	100%

		Kuangan Akhir Tahun SKPD								
5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	1 Dokumen				1 Dok	2 Dok	100%
5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	42 Laporan	100%
5.02.01.02.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dok Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					-			
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	63 Buah					63 buah	63 Buah	100%
5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut					-		-	

		Kelengkapan								
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100%
5.02.01.02.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					-		-	
5.02.01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dok Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					-		-	
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	2 Orang				5 Orang	7 Orang	100%
5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67 Orang	67 Orang					67 Orang	100%
5.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	100%

		Disediakan								
5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54 Paket	18 Paket	18 Paket	18 Paket	100%	18 Paket	54 Paket	100%
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100%
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	16 Laporan	100%
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%
5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dok	2 Dok				2 Dok	4 Dok	100%
5.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase BMD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan								

5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	20 Unit	10 Unit				10 Unit	20 Unit	100%
5.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
5.02.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
5.02.01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan								
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan	46 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	46 Unit	100%

[illegible]

	KEUANGAN DAERAH	Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan								
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase Dok rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%		2 Dok	100%
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bidang	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100%

	Anggaran	Anggaran								
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dok Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dok	1 Dok				1 Dok	2 Dok	100%
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dok Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok	1 Dok				1 Dok	2 Dok	100%
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dok Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dok	1 Dok				1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dok Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4 Dok	2 Dok				2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100%

5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dok Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dok	1 Dok				1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	4Dok	2 Dok				2 Dok	4 Dok	66,67%

		Terkait								
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dok	2 Dok				2 Dok	4 Dok	100%

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Secara umum perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perubahan atau pergeseran pagu anggaran sehingga beberapa pagu anggaran sub kegiatan harus disubstitusikan pada sub kegiatan lainnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 yang tercantum pada tabel 2.1 dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 4 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja yang mana dari seluruh kegiatan tersebut masing-masing sub kegiatan berhasil memenuhi target kinerja sebesar 100%.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, 5 sub kegiatan telah memenuhi target sebesar 100% dan 1 sub kegiatan lainnya berhasil memenuhi target namun masih terdapat kekurangan dalam Dok yang dihasilkan. Pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah telah mencapai target sebanyak 5 Dok. Di dalam Dok tersebut seharusnya terdapat 284 sertifikat yang harus dipenuhi namun pada tahun 2024 hanya terealisasi sebanyak 49 Sertifikat. Hal tersebut disebabkan karena jarak antar lokasi yang dituju sangatlah jauh dan kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan teknis kegiatan sehingga pegawai harus berlomba dengan waktu dalam memenuhi penyelesaian target tersebut.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Dari 23 sub kegiatan pada program ini berhasil memenuhi target sebesar 100%,

- b. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dari 3 program dan 14 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja tahun 2024.

- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Untuk memenuhi target kinerja dalam pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun 2024 terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah faktor pendukung keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai realisasi kinerja yaitu :

- 1) Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dok perencanaan
- 2) Komitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) dan aplikasi lainnya sehingga mampu mengkoordinasikan OPD dalam melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan pengelolaan BMD yang tertib administrasi
- 3) Konsistensi dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 4) Adanya kerjasama yang terarah, terukur dan inovatif sehingga menciptakan inovasi-inovasi di dalam pelaksanaan program,
- 5) Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024.

Adapun faktor penghambat keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi realisasi kinerja yaitu :

- 1) Belum sempurnanya aplikasi yang digunakan sehingga sering kali terjadi *error system* yang menghambat kegiatan operasional instansi
- 2) Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Secara umum penyebab rendahnya tingkat capaian kinerja program/kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah adalah adanya *recofusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam upaya Pemenuhan belanja prioritas dan mandatory sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai Rencana Kerja pada tahun 2024 karena terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan.

Adapun implikasi capaian kinerja renja tahun 2024 terhadap capaian kinerja Renstra 2024-2026 adalah mendorong tingkat capaian renstra sebesar 21,60% dari seluruh program/kegiatan dengan rincian capaian kinerja pada program pengelolaan keuangan daerah sebesar 24,65%, program pengelolaan barang milik daerah sebesar 15,14% dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar 25,01%.

Pada program pengelolaan keuangan khususnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memperoleh capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra 2024 melebihi target Renstra yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian kebutuhan dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sehingga pada akhir periode Renstra 2024-2026 diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 142,86% dengan target sebanyak 7 laporan dan realisasi kinerja sebanyak 10 laporan.

e. Kebijakan/tindakan yang timbul terhadap perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan tabel 2.1 hasil evaluasi Renja tahun 2024 dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran diperlukan adanya analisis secara menyeluruh mengenai penetapan anggaran prioritas, *mandatory* dan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadi penting adalah pengadaan atau pemeliharaan Komputer, Printer, AC (*Air Conditioner*) di ruang rapat BPKAD guna mendukung konsentrasi dan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan kegiatan rapat kerja. Selain itu BPKAD belum memiliki ruang arsip sebagai tempat penyimpanan Dok, sementara itu beberapa gedung di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan di Jl. Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan tidak digunakan sehingga perlu adanya realokasi anggaran beberapa kegiatan untuk dapat mengalih fungsikan gedung tersebut menjadi gudang arsip BPKAD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sebagai Unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan dalam pengelola keuangan dan aset daerah yang dapat mengakomodasi perubahan sumber daya yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi yang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan.

Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan program tingkat Pemerintah Kabupaten Bangkalan menjadi mutlak.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Secara substansial memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan terpadu.

Sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan normatif, bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran / hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk kegiatan/program harus terukur secara jelas indikator kinerja yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/ sasaran yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana yang terpadu dimana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara integrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) secara bertahap dan berkesinambungan. Hal tersebut antara lain :

1. Perlu upaya melibatkan masyarakat dalam proses Pembangunan Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran ;
2. Pengendalian pelaksanaan anggaran untuk menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Upaya mempercepat proses desentralisasi manajemen pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah ;
3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelola keuangan tersebut adalah bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi semangat dominan dan mewarnai penyelenggaraan pemerintahan utamanya dalam mengelola keuangan daerah. Terkait dengan hal diatas, Pemerintah Kabupaten

Bangkalan telah menyusun Dok APBD sebagai refleksi dari sasaran prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- c. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS).

Yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dengan hasil Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dimana secara aplikatif akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai manifestasi kepala Perangkat Daerah.

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, peningkatannya diupayakan melalui jalur formal dan jalur non formal.

Dalam upaya efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti study banding, undangan dalam rangka workshop, seminar dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara tertib agar tidak membebani biaya perjalanan dinas dan disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangkalan.

Pengelolaan dan pendayagunaan Barang Daerah dilaksanakan secara tertib dan optimal dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut;

- a. Setiap Perangkat Daerah wajib mencatat seluruh aset yang pengadaannya diperoleh dari APBD Kabupaten maupun sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penyerahan aset hasil Belanja Langsung harus dilakukan dengan berita acara Penyerahan yaitu dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyerahkan kepada Bupati Bangkalan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mencatat sebagai inventaris Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan selanjutnya

- inventarisasi terhadap seluruh aset dilakukan secara tertib dan berlanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitas dan usia teknis sarana dan prasarana yang telah dibangun, maka penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan yang disediakan hendaknya didasarkan kepada hasil inventarisasi aset yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, oleh karena itu inventaris terhadap setiap barang baik yang telah ada maupun yang baru dibeli harus dicatat dengan tertib dan dilaporkan secara berkala, sedangkan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan inventarisasi aset perlu lebih meningkatkan ketertiban ;
- d. Dalam upaya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran belanja, maka efisiensi pemeliharaan kendaraan bermotor ditingkatkan, disamping itu dilakukan langkah-langkah penertiban penggunaan kendaraan dinas operasional secara efektif.
- e. Penyediaan belanja barang harus didasarkan kepada Rencana Kebutuhan Barang Umum Daerah yang benar-benar sangat diperlukan dan tidak bergaya mewah, selanjutnya belanja barang harus didasarkan juga pada Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU)

Pada aspek keuangan Perangkat Daerah yang mendukung ketercapaian indikator dari aspek ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, adapapun capaian indikator yang telah dicapai dari tahun 2020-2024 adalah

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan DAerah	10.9 %	11.94 %	12.70 %	17.13 %	17.10 %
3	Pertumbuhan PAD	-11.09 %	16.50 %	3.76 %	38.57 %	57.91 %

Terdapat 3 indikator yang menjadi talak ukur kinerja keuangan Kabupaten Bangkalan, indikator yang pertama adalah *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)*, Kabupaten Bangkalan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 Tahun berturut-turut, artinya LKPD tersebut dissajikan dan diungkap secara wajar dan berkualitas.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

[illegible]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijakan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu system operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan dan pengembangan yang akan dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, untuk kedepan dibutuhkan solusi – solusi yang strategis.

Adapun permasalahan secara umum yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam tata kelola keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan;

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Agar kinerja pegawai di Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan;

- 3) Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kurang tertibnya administrasi dari petugas pengelola keuangan dan barang milik daerah mengakibatkan terganggunya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja penghapusan aset di setiap Perangkat Daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD)

- 4) Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah

Beban kerja yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Bangkalan mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan sumber daya manusia baru guna memudahkan tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD sekaligus PPKD Kabupaten Bangkalan

- 5) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih belum dilakukan integrasi dengan menggunakan sistem aplikasi yang basis datanya berbeda. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka diperlukan integrasi aplikasi keuangan dan barang milik daerah.

- 6) Kurangnya dukungan sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki tugas untuk melayani dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan adanya dukungan pengembangan teknologi informasi guna mempersingkat waktu pelayanan. Sehingga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Permasalahan yang belum diselesaikan pada periode tiga tahun sebelumnya menjadi isu strategis yang memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di periode tiga tahun mendatang. Maka isi-isu strategis utama yang perlu diperhatikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan sistem pada SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
2. Perlu adanya Peningkatan kualitas SDM dalam proses Penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
3. Perlu adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 4.

2.4 Review terhadap RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam Dok Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bangkalan	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	417.295.018.483	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bangkalan			454.790.894.983	
								Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	34,26%	1.114.000.000	
								Persentase Penurunan SILPA	14%	468.907.471.583	
								Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bangkalan	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	1.457.835.500	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bangkalan	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	1.114.000.000	
a	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	30.350.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	15.000.000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	30.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	15.000.000	
c	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	14.250.000	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	12.000.000	

d	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	14.250.000	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	12.000.000	
e	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	43.750.000	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	15.000.000	
f	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	38.587.500	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	15.000.000	
g	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	445.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	400.000.000	
h	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	425.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	400.000.000	
i	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	379.368.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	200.000.000	
j	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	13.465.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	10.000.000	
k	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	13.465.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	10.000.000	
l	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	10.000.000	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	100.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	100.000.000	

a	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	10.822.000	
b	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	15.000.000	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	15.000.000	
c	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	9.338.000	
d	Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	10.000.000	Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	9.840.000	
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	15.000.000	
f	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	10.000.000	

g	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	15.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	15.000.000	
h	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	15.000.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	100.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	100.000.000	
a	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	-	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	7.788.800	
b	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	19.797.350	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	12.632.500	
c	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	28.400.850	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	21.426.500	

d	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51.801.800	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	53.143.600	
e	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.008.600	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bangkalan	Prosentase Bantuan Keuangan Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	415.637.182.983	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bangkalan	Prosentase Bantuan Keuangan Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	453.476.894.983	
a	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	398.071.704.700	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	422.261.416.700	
b	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	4.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	4.000.000.000	
c	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	13.565.478.283	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	27.215.478.283	
B	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bangkalan	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	805.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bangkalan	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	860.000.000	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	100%	805.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	100%	860.000.000	

a	Penyusunan Standar Harga	Bangkalan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Standar Harga	Bangkalan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	150.000.000	
b	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlag Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan	15.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlag Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan	15.000.000	
c	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	500.000.000	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	560.000.000	
d	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	15.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	15.000.000	
e	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	125.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	110.000.000	
f	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	164 orang	-	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	164 orang	10.000.000	
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bangkalan	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	83	45.359.368.181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bangkalan	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	83	37.782.669.929	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	19.826.250	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	19.265.000	

a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.971.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.735.000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.366.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.735.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.366.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.735.000	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.357.750	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.735.000	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.357.750	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.735.000	
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3.066.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.735.000	
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	2.341.250	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	2.735.000	
h	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Bangkalan	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Bangkalan	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	120.000.000	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	51 Orang/bulan	40.977.256.551	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	51 Orang/bulan	33.686.708.614	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	40.971.291.051	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	33.681.238.614	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.401.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.735.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2.564.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2.735.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bangkalan	Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	100%	5.308.250	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bangkalan	Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	100%	5.470.000	
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.806.750	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.735.000	
b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	2.501.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	2.735.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	17.795.550	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	17.880.000	

a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.839.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.880.000	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bangkalan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bangkalan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang	3.955.750	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang	4.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	318.234.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	276.000.000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	60.000.000	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000	
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	9.000.000	

g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100.000.000	
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3.234.750	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Persentase Barang Milik Daerah yang teenuhi	100%	65.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Persentase Barang Milik Daerah yang teenuhi	100%	45.000.000	
a	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	65.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	45.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang teenuhi	100%	3.693.395.130	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	3.542.858.315	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	269.850.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	269.850.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.421.045.130	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.270.508.315	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	262.551.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	189.488.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	95.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	70.450.000	

b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	71.060.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	50.488.000	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	55.730.542	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	38.550.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.261.158	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	
Jumlah					463.459.386.664					493.433.564.912	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan disamping itu penyusunan program dan kegiatan telah dikaitkan dengan isu-isu penting tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan, maka BPKAD Kabupaten Bangkalan untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2026 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2026
Kabupaten Bangkalan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun (SPPN), rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tidak terlepas dari amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan Untuk mendukung Capaian pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, yang terangkum dalam visi pembangunan nasional untuk tahun 2024-2028 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 8 (delapan) misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Generasi Z) dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Adapun program-program yang mendukung misi pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dari 8 (delapan) Asta Cita tersebut sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah asta cita ke 7 yaitu ***“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”***. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat Transformasi Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana diharapkan. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional yang tersusun dalam Nawa Bhakti Satya adalah sebagai berikut :

1. JATIM SEJAHTERA

Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu

2. JATIM KERJA

Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing

3. JATIM CERDAS

Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan

4. JATIM SEHAT

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).

5. JATIM AKSES

Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.

6. JATIM BERKAH AMANAH

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

7. JATIM AGRO

Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

8. JATIM HARMONI

Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.

9. JATIM LESTARI

Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan,

serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.

Dari (9) sembilan Nawa Bhakti Satya tersebut sesuai dengan Proritas Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Nawa Bhakti Satya ke 6 ***“JATIM BERKAH AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif”*** Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan antikorupsi.

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan yang dirancang dalam Panca Dharma Prasetya adalah :

1. Bangkalan berakhlak dan berdaya saing
Mewujudkan pembangunan manusia yang berakhlakul karimah, cerdas, sehat dan berdaya saing.
2. Bangkalan sejahtera
Mewujudkan pelayanan sosial yang prima dan lebih baik.
3. Bangkalan tumbuh dan lestari
Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
4. Bangkalan melayani
Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas dan transparan.
5. Bangkalan potensial dan mandiri
Memaksimalkan potensi daerah untuk menunjang ekonomi lokal dan mewujudkan daerah ramah investasi.

Dari 5 (lima) Panca Dharma Prasetya tersebut sesuai dengan Proritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Panca Dharma Prasetya ke 4 ***“Bangkalan melayani penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas dan transparan”*** Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang diemban, tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan harus selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur *“Bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045”* dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu *“Optimalisasi gangguan ketertiban umum, serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”*. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan menyusun rancangan tujuan pembangunan Daerah yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Menurunkan angka kemiskinan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan berpedoman pada prioritas pembangunan kabupaten Bangkalan yaitu Memperkuat Penyelenggaraan Birokrasi Berkualitas, Inovatif, Melayani, Transparan Dan Anti Korupsi, Serta Memperkuat Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Harmonis Dan Anti Narkoba Melalui Pengembangan Nilai-Nilai Toleransi, Keadilan Dalam Keberagaman, Memperkokoh Ideologi Pancasila Dan Demokrasi.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah ***“Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun

sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel
- b. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Uraian	Tujuan Perangkat Daerah						Sasaran								Ket
	Indikator Kinerja	Realisasi	Target				Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi	Target					
		2024	2025	P. 2025	2026	2027			2024	2025	P. 2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6		5	6	7	8	9	10		11	
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD tepat waktu	Sesuai	Sesuai	Sesuai				
								Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	100%	100%				
								Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2.50	2.30	2.30				
							Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65.00	70.00	75.00				
								Indeks Kepuasan Masyarakat	92.00	93.00					
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Penetapan APBD tepat waktu	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai		
								Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%		100%	100%	100%		
								Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2.50		2.30	2.00	2.00		
							Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65.00		75.00	80.00	80.00		
								Indeks Kepuasan Masyarakat	92.00		95.00	95.00	95.00		

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Pembangunan Kabupaten dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, disebutkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sedangkan program yang mendukung isu-isu strategis daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.2
Strategi dan Kebijakan Program Kegiatan Perangkat Daerah

Strategi	Kebijakan
4	5
Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.	Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.
Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi	Melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan pendidikan/pelatihan khusus
Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki	Penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dengan kinerja yang optimal
Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian Penyusunan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Pemanfaatan teknologi untuk evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Penyusunan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian Penyusunan Anggaran	Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Memaksimalkan kewenangan pengendalian Penyusunan Anggaran sehingga pemanfaatan dana yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal	Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus	melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang ada
Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan manajemen process bussiness	Melakukan pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD

Sosialisasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian	Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan seminar/pendidikan pelatihan dan sejenisnya.
Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan Penyusunan Anggaran dan regulasi yang mengaturnya.	Manajemen Dok administrasi yang lengkap dan terkini
	Mengadakan workshop serta pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli
	Menyusun Analisa Standar Belanja, Standar Harga dan Regulasi yang mendukung kinaerja Perangkat Daerah

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bangkalan, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						493.433.564.912							516.002.397.197	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						493.433.564.912							516.002.397.197	
	5.02	KEUANGAN						493.433.564.912							516.002.397.197	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	85 Indeks			85 Indeks	37.782.669.929						85 Indeks	45.080.925.614	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100 %			100 %	19.265.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANA Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 %	24.500.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu				100 %					4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				

	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	2.735.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Majjah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANA Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	3.500.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
											4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)	4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	2.735.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Majjah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANA Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	3.500.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
											4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)	4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen				2 Dokumen	2.735.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	3.500.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)					
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen				2 Dokumen	2.735.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	3.500.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)					
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	2.735.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Majalah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	3.500.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan			6 Laporan	2.735.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Majalah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	3.500.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan			8 Laporan	2.735.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANAH Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	3.500.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	120.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANAH Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan		0	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH

[illegible]

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	2 Laporan			2 Laporan	2.735.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	3.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4 Laporan			4 Laporan	2.735.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	3.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik</i>	100 %			100 %	5.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 %	7.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

											dan penyeludupan	4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.735.000	Kab. Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	3.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan			14 Laporan	2.735.000	Kab. Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	3.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				

	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100 %			100 %	17.880.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 %	18.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)					
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	3.880.000	Kab. Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	4.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)					
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang			2 Orang	10.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Orang	10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	67 Orang			67 Orang	4.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Orang	4.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan</i>	100 %			100 %	276.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 %	276.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

											dan penyeludupan	4 Bangkalan melayani (Penyelenggaran birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	5.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Paket	5.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											4 Bangkalan melayani (Penyelenggaran birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)					
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket			18 Paket	60.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Paket	60.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

											dan penyeludupan	4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraaan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Paket	15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraaan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)					
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	80.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Paket	80.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraaan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)					
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen				1 Dokumen	4.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	4.000.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
													4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan				4 Laporan	9.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	9.000.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET
													4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan			4 Laporan	100.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	100.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	3.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	3.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi</i>	100 %			100 %	45.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 %	45.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

											dan penyeludupan	4 Bangkalan melayani (Penyelenggara birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	45.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 4 Bangkalan melayani (Penyelenggara birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)	Kabupaten Bangkalan	0 Unit	45.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %			100 %	3.542.858.315			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 4 Bangkalan melayani (Penyelenggara birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)	Kabupaten Bangkalan	0 %	3.663.931.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	4 Laporan				4 Laporan	2.500.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANAH Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	2.500.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)					
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan				4 Laporan	269.850.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANAH Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	269.850.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)					
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	3.270.508.315	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	3.391.581.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %			100 %	189.488.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 %	260.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit			22 Unit	70.450.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Unit	90.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

											dan penyeludupan	4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraaan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit			51 Unit	50.448.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Unit	70.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraaan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit			167 Unit	38.550.000	Kab. Bangkalan Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Unit	50.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraaan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	30.000.000	Kab. Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Unit	50.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	30% 6% 100%			34,25% 14% 100%	454.790.894.983						34,25% 14% 100%	470.121.471.583	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100 %			100 %	1.114.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 %	1.114.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan				100 %					4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				

	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Majjah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Majjah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	12.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	12.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	12.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	12.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	15.000.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	15.000.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	400.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggara aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	400.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggara aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	200.000.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH- AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	2.0 Rasio			100 %	100.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Rasio	100.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

			Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD sebelumnya				2.0 Rasio				dan penyeludupan	4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraaan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	10.822.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraaan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraaan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														

			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	9.338.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen			2 Dokumen	9.840.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000	Kab. Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawabana Sub Kegiatan	1 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	2.00 Rasio			100 %	100.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Rasio	100.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

			Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD sebelumnya				2.00 Rasio				dan penyeludupan	4 Bangkalan melayani (Penyelenggara birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen			1 Dokumen	7.788.800	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggara birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawab n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan			1 Laporan	12.632.500	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	20.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggara birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	1 Laporan			1 Laporan	21.426.500	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	30.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	53.143.600	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	30.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														

			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	5.008.600	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan</i>	2.00 Rasio			100 %	453.476.894.983			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Rasio	468.807.471.583	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			<i>Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD sebelumnya</i>				2.00 Rasio					4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	4 Laporan			4 Laporan	422.261.416.700	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	437.591.993.300	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

											dan penyeludupan	4 Bangkalan melayani (Penyelenggar aan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan			2 Laporan	4.000.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	4.000.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan			4 Laporan	27.215.478.283	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	27.215.478.283	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100 %			100 %	860.000.000						100 %	800.000.000	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi dengan baik Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	100 %			100 %	860.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 %	800.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
							100 %					4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	150.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	150.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	14 Laporan			14 Laporan	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggara an birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	5 Dokumen			5 Dokumen	560.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Dokumen	500.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggara an birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan			4 Laporan	15.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan			4 Laporan	110.000.000	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Mlajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Kabupaten Bangkalan	0 Laporan	110.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
												4 Bangkalan melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan)				
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

[illegible]

Berdasarkan tabel 4.1 di atas yang menjadi prioritas berdasarkan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi prioritas adalah kegiatan dari bidang anggaran dan kegiatan dari bidang akuntansi dan perbendaharaan. Kegiatan dari bidang anggaran yang menjadi prioritas yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 445.000.000,- serta Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 425.000.000,-. Sub kegiatan tersebut menjadi prioritas karena APBD yang tersusun menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan dari bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi prioritas yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 23.400.850,-. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi prioritas sebab LKPD merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur capaian kinerja dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi prioritas adalah kegiatan dari bidang administrasi aset pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Sub kegiatan ini menjadi prioritas karena pentingnya legalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya sengketa tanah dan mengoptimalkan pengelolaan tanah sebagai aset milik pemda untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Rekapitulasi tanah dalam rangka legalisasi atau sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan

No.	Tahun	Akumulasi Sertifikat	Sertifikat	Akumulasi Bidang Bersertifikat	Bidang Belum Bersertifikat	Target Sertifikasi Bidang	Jumlah Aset (Bidang)
1.	2023	520	47	441	1229	156	1826
2.	2023	567	57	597	1172	57	1826
3.	2024	624	290	654	882	290	1826
4.	2025	914	441	944	441	441	1826
5.	2026	1355	441	1385	0	441	1826

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat perbedaan antara target bidang yang disertifikasi dengan jumlah sertifikat. Perbedaan tersebut terjadi karena 34 bidang atau tanah yang merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diusulkan menjadi 4 sertifikat. Pada tahun 2023-2026 rincian target sertifikasi bidang direncanakan selaras dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis BPKAD Tahun 2024-2028, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan 2024-2028, sehingga tahun ini merupakan awal perencanaan target kinerja.

Target kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja yang ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program PD secara umum dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Penetapan Renja PD yang berada dipertengahan tahun anggaran memiliki rentang waktu yg cukup lama dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana yang akan dilakukan pada proses penganggaran dalam RAPBD. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal di Kabupaten Bangkalan, antara lain :

- a. Perubahan kebijakan atau Peraturan dan Perundangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat;
- c. Ketersediaan anggaran yang tersedia;
- d. Dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan tahun 2025, kami sampaikan banyak terima kasih semoga Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2025 bermanfaat sebagaimana mestinya

Bangkalan, 14 Agustus 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**



AHMAT HAFID, SE, MM

NIP. 19690131 199003 1 003

Formulir E.29
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat daerah	√			
2	Pengelolaan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat daerah	√			
10.a	Menyeleraskan program dan kegiatan Perangkat daerah Propinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif	√			
11	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan perkiraan maju	√			
14	Dokumen renja perangkat daerah yang telah disahkan		√		

Bangkalan, 14 Agustus 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

AHMAT HAFID, SE, MM
NIP. 19690131 199003 1 003